

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- André J. Hoekema, 2003, *A New Beginning of Law Among Indigenous Peoples: Some Observation from Anthropology of Law*, Leiden: Brill Academic Publishers.
- Bewa Ragawino, 2008, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Bushar Muhammad, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.
- Christy Madya Putri, 2016, *Peran Kedamaian Dalam Menyelesaikan Konflik Pemanfaatan Bukit Puruk Kambang Antara Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang Dan PT Indo Muro Kencana (Studi Kasus Di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah)*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atmajaya
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djojodigoeno, 1950, *Adat Law in Indonesia*, Djakarta: MCMLI Jajasan Pembangunan.
- Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung: Alumni.
- Elise T. Sulistini & Rudy T. Erwin, 1987, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda.
- Herman Slaats, et al., (ed.), 1993, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum Adat: Suatu Laporan Penataran*, Aceh: Syahkuala University Press dan Pusat Studi Hukum Adat dan Islam Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung.
- Hugh Collins, 2001, *Marxism and Law*, New York: Oxford University Press.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Iman Sutikno, 1985, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- J. F. Holleman, 1981, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
- Jamie Davidson & David Henley, eds., 2007, *The Revival Of Tradition In Indonesian Politics: The Deployment Of Adat From Colonialism To Indigenism*, London: Routledge.
- Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press.
- K. Ng. Soerbakti Poesponoto, 1987, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adat Recht)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Kurniawarman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Hak Atas Tanah Di Sumatera Barat*, Padang: Andalas University Press.
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*, Jakarta: HuMa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian hukum, Cetakan Ke-III*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Purnadi Purbacaraka & A. Ridwan Halim, 1982, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Kajian Hukum Adat 'Djojodigono' Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2019, *Hukum Yang Hidup Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Brief Paper Draft.
- R. Supomo, 1962, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung: PT Mandar Maju.
- R. Yando Zakaria, 2013, *Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Antropologis*, Jakarta: Simposium Masyarakat Adat II.
- Rachmad Safa'at, 2016, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang: Surya Pena Gemilang.

- Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre: Regional Initiative on Indigenous Peoples' Rights and Development (RIPP).
- Rosiana Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: Rajawali Pers.
- Siti Maimunah, 2012, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, Malang: Intrans Publishing.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Rajawali Press).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Ke-IV*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.
- Ter Haar, 1962, *Adat Law in Indonesia*, Jakarta: Bhatara.
- Ter Haar, 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar, 2013, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. A. Safitri & L. Uliyah, 2014, *Adat dan Pemerintah Daerah. Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Epsitema Institute.
- M. Koesnoe, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga Surabaya: Univesity Press.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Penelitian*, Jakarta: Gramedia.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Maria S.W. Sumardjono, 2018, *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press.
- Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti, Cetakan IV*, Jakarta: Erlangga.
- Oloan Sitorus, 2004, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Cetakan Perdana*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- T. M. Power, 2002, *Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development*, Washington DC: Oxfam America.
- Van Vollenhoven, 1909, *Miskenningen van het Adatrecht*, Leiden: Brill.
- Warman, *et al.*, 2009, *Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat*, Padang: Qbar.
- World Agroforestry Centre (ICRAF) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2003, *Forest Peoples Programme*, Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- Achmad Caesar Luthful Hakim dan Sartika Intaning Pradhani, "Penerapan Pendekatan Formalistik Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 2021.
- Almonika Cindy Fatika Sari, *et al.*, "Pelepasan Hak Adat atas Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan", *Jurnal Dictum*, 14, 2021.
- Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 2019.
- Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris, Cetakan IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlambang P. Wiratraman, "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat", *Mimbar Hukum*, 30(3), 2018.

- I. Kamenetsky, "Lebensraum in Hitler's War Plan: The Theory and the Eastern European Reality". *The American Journal of Economics and Sociology*, 20(3), 1961.
- Jenny K. Matuankotta, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam". *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 2010.
- Munauwarah, "Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur antara Masyarakat Adat To Karunsi'e dengan PT Vale Indonesia", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2016.
- Nabilla Desyalika Putri, "Kedudukan Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan Pada Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Negara Kesejahteraan", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), 2014.
- Ning Adiasih, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan", *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(1), 2018.
- Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek." *Yuridika*, 32(2), 2017.
- Rachmad Safa'at & Indah Dwi Qurbani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur)." *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 2017.
- Rikardo Simarmata, "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat", *Mimbar Hukum*, 30(3), 2018.
- S. Sulastriyono & Sartika Intaning Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno Dan Relevansinya Kini", *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 2018.
- Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional". *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 2021.
- Sartika Intaning Pradhani, "Perspektif Pemikiran Hukum Barat Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan", *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 2020.
- Simangunsong, S. H. & Frans M. H. "Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum", *RATU ADIL*, 3(2), 2014.

Upik Djalins, "Re-examining Subject Making in the Netherlands East Indies Legal Education: Pedagogy, Curriculum, and Colonial State Formation", *Itinerario*, XXXVII(2), 2013.

W. Smith, "Friedrich Ratzel and the Origins of Lebensraum". *German Studies Review*, 3(1), 1980.

Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan", *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 2016.

Wahyu Nugroho, *et al.*, "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis", *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 2019.

### Website

Andita Rahma, "JATAM Nasional Catat ada 45 Konflik Tambang Sepanjang 2020", <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

JATAM, "2020 Adalah Tahun Panen Ijon Politik Tambang Kriminalisasi Hingga Berujung Bencana", <https://www.jatam.org/2020-adalah-tahun-panen-ijon-politik-tambang-kriminalisasi-hingga-berujung-bencana/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Mongabay, "Kilas Balik Konflik 2013: dari Protes Tambang Pasir hingga Suku Anak Dalam yang Kehilangan Lahan", <https://www.mongabay.co.id/2013/12/30/kilas-balik-konflik-2013-dari-protes-tambang-pasir-hingga-suku-anak-dalam-yang-kehilangan-lahan/>, diakses pada tanggal 19 September 2021

Raja Eben Lumbanrau, "Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan', Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2021.

### Pidato & Konferensi

Rafael Edy Bosko, "Reconsidering the Inalienability of Communal Ulayat Rights: Theoretical Overview", *prosiding*, 9<sup>th</sup> ALIN Expert Forum Land Rights Law

in Asian Countries, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 12 Juni 2014.

Ter Haar, “Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in Wetenschap, Pracktijk en Onderwijs”, *Pidato*, Dies Natalies Rechtshogeschool, Batavia, 1937.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.